



PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA MEDAN

Ririn warliana¹, Laylan Syafina², Hendra Hermain³

AFILIASI:

Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*KORESPONDENSI:

ririnwarliana@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i3.4060](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060)

CITATION: Warliana, R., & Syafina, L. (2023). PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA MEDAN. *Jurnal Proaksi*, 10(3), 366–381. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

5 Juni 2023

Di Review:

2 Agustus 2023

Diterima:

15 September 2023

Abstrak

Perkembangan sektor publik di Indonesia adalah faktor penguat tuntutan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kota medan adalah salah satu dampak pemerintahan yang harus menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik yang terdapat pada peraturan pemerintahan No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Medan dan kualitas aparatur pemerintah daerah, dengan pengambilan data menggunakan metode *Accidental Sampling*, dengan sampel sebanyak 38 responden dan SPSS Statistics Versi 25 untuk pengolahan data. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintahan digunakan sebagai variabel bebas dan laporan keuangan sebagai variabel terikat dalam pengujian data pada analisis regresi linier berganda pada penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Kata Kunci: PSAP, Kualitas Aparatur, Laporan Keuangan

Abstract

The development of the public sector in Indonesia is a reinforcing factor for the demand for quality government financial reports. Medan city is one of the impacts of government that must produce quality financial reports that meet the characteristics contained in government regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. This study aims to find out how the effect of the application of Government Accounting Standards on the Medan City Regional Financial Statements and the quality of local government apparatus, by collecting data using the Accidental Sampling method, with a sample of 38 respondents and SPSS Statistics Version 25 for data processing. Application of Government Accounting Standards and Quality of Government Apparatuses are used as independent variables and financial statements as the dependent variable in testing data on multiple linear regression analysis in this study. Based on the results of the research that has been done, it shows that the application of accounting standards and the quality of government officials have a positive effect on financial reports.

Keywords: PSAP, Apparatus Quality, Financial Reports.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya akuntansi sector public di Indonesia, maka perwujudan tanggung jawab terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Organisasi sector public sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat (Aminy dkk., 2021). Pemerintah merupakan entitas public yang mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan yang berkewajiban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis maupun transparan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang menyangkut pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah menjadi jelas dalam analisis pengelolaan keuangan. Pengungkapan keuangan akan diakui dengan tepat ketika keterusterangan dan tanggung jawab dilakukan oleh kemandirian provinsi sehingga perincian keuangan yang besar mencerminkan administrasi pemerintahan yang baik (*great government administration*) (Hendri & NR, 2020).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan terhadap beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (Umi & Ayu, 2020). Oleh karena itu, informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 71 tahun 2010, kriteria berikut harus dipenuhi agar laporan keuangan berkualitas tinggi: dapat diandalkan, relevansi, dan dapat dibandingkan, serta dapat dinormalisasi. Akibatnya, badan pengawas keuangan tidak perlu memberikan izin untuk laporan keuangan berkualitas tinggi untuk disajikan setiap tahun dalam opini penilaian wajar (Mudrikah & Ali, 2020).

Sebagai sarana evaluasi pertanggungjawaban dan menghasilkan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021) laporan keuangan pemerintah harus disajikan dengan cara yang memberikan manfaat bagi pengguna informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut: 1) menyajikan data apakah pendapatan periode berjalan cukup untuk menutup semua pengeluaran; 2) memperkenalkan data tentang kelayakan dalam memperoleh aset keuangan dan porsinya dengan menggunakan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan oleh mertua dan pedoman; 3) memberikan suatu informasi dengan jumlah sumber daya keuangan yang telah digunakan dalam aktivitas pemerintahan serta hasil yang diperoleh dari hal tersebut; 4) Memberikan informasi mengenai kebutuhan kas pada entitas keuangan dan pembiayaan dari semua aktivitas 5) memberikan informasi tentang situasi dan kebutuhan keuangan entitas pelapor saat ini sehubungan dengan sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang, seperti pinjaman dan pajak; 6) Mengindikasikan apakah posisi keuangan entitas pelapor membaik atau memburuk akibat aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan dengan menyediakan informasi. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Triwardana, 2017).

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diperoleh kompeten dan hasil data audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan tidak berbeda satu sama lain, maka kualitas laporan keuangan pemerintahan merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah. Dilansir dari (dinas kominfo kota medan, 2021) Setelah bertahun-tahun pemerintahan kota Medan mendapatkan sebuah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Kota Medan akhirnya mendapatkan penghargaan sebuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan pada Tahun Anggaran 2020 dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Sumut sebagaimana dilaporkan Dinas Kominfo Kota Medan Tahun 2021. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menerima peningkatan laporan keuangan dalam rangka menerima WTP tahun anggaran 2020. Namun, pendapat WTP tidak berarti semua temuan dimasukkan; sebaliknya, masih

terdapat temuan-temuan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan pencarian solusi (Hartono & Ramdany, 2020).

Berikut ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah terhadap laporan keuangan yang dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Penelitian dari (Mahardini & Miranti, 2018) dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh yang positif pada pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintahan terhadap laporan keuangan. Sebaliknya, penelitian (Sholohah dkk., 2019) memberikan pendapat bahwa kualitas sumber daya manusia dan penerapan SAP tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada laporan keuangan. (Ayu Kurnia & Jaeni, 2022) Laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan yang disajikan belum dikatakan optimal disebabkan kurangnya aparatur belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang tepat, sehingga menimbulkan cerminan kualitas Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam menyusun serta menyajikan hasil laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Informasi keuangan yang digunakan oleh pemerintahan terdapat proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan interpretasi suatu transaksi keuangan pemerintahan, memberikan pemahaman informasi yang telah disajikan pada laporan keuangan untuk memudahkan audit adalah sah ketika menggunakannya. (Mulia, 2019)

Menurut (Rusmana dkk., 2017) Standar Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah konsep, ketentuan, prosedur, metode maupun teknik secara teoritis dan mudah dapat digunakan untuk mencatat, memperjelas, meringkas, menyesuaikan, melaporkan, serta menganalisis transaksi keuangan pemerintahan yang telah dipilih dan ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengembangkan standar kemudian memodifikasinya menjadi pedoman. Sebuah Konsep, ketentuan, metode, prosedur, dan teknik ini tersedia secara internasional maupun di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur dalam pengikhtisar fiskal yang ditetapkan untuk membangun sifat laporan keuangan yang baik terhadap rencana pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik antar periode maupun antar substansi. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Informasi yang dikatakan relevan Untuk tentang posisi keuangan organisasi serta semua transaksinya selama periode pelaporan, laporan keuangan disusun secara terstruktur. Khususnya laporan keuangan digunakan untuk menilai bagaimana keadaan keuangan organisasi, mengevaluasi efektivitas serta efisiensinya, dan memberikan informasi dalam menentukan kepatuhan hukum dan peraturan. Laporan ini juga dapat untuk menentukan nilai dari sumber pendanaan yang telah digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Jati, 2019). Informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan digunakan untuk memenuhi persyaratan informasi yang digunakan untuk menentukan membuat keputusan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pertimbangan yang cermat harus diberikan pada keputusan untuk menyajikan laporan keuangan. Penyelenggaraan pembukuan pada pemerintah daerah harus mengacu pada norma pembukuan pemerintah serta pedoman yang berkaitan dengan aturan administrasi keuangan daerah (Dalimunthe, 2021).

Aparatur Pemerintahan Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aparatur sebagai alat atau perangkat (bagi negara atau pemerintah); pejabat pemerintah; negara adalah organ negara, khususnya yang

Warliana, Syafina, Hermain
PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
MEDAN

meliputi bidang kelembagaan, kepengurusan dan kepegawaian, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari; pemerintah pekerja pemerintah; perangkat negara; mesin Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah adalah sebuah perangkat pembantu kepala daerah serta wakil rakyat daerah dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap urusan daerah (Ikriyati & Aprila, 2019).

Menurut (Hermawan, 2022), SKPD dituntut memiliki aparatur yang berkompeten di bidang akuntansi, didukung dari pendidikan, keahlian, dan keikutsertaan dalam pembinaan sebagai penunjang untuk menggali potensi diri dalam mengoptimalkan kompetensi di bidang akuntansi. Hal ini akan mencegah kegagalan aparatur daerah dalam memahami laporan keuangan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut (Mahmudah, 2017) mengambil keputusan terbaik adalah aset manusia menunjukkan presentasi individu dan kapasitas untuk memecah masalah dalam lingkup pekerjaan dan posisi. Namun, hal itu juga tidak lepas dari pemilihan karyawan yang cermat dan cermat untuk posisi dan pekerjaan tertentu. Karyawan yang mampu melakukan tugas tertentu mungkin merasa lebih cocok dan bermanfaat untuk menempatkannya di bidang yang sama. Suatu organisasi akan mencapai kinerja maksimal dan mengurangi kesalahan dalam tugas atau bekerja dengan orang yang memiliki integritas yang tinggi (Az-Zahra, 2019).

Ketika datang untuk melaksanakan tanggung jawab, kualitas memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan kinerja yang tinggi. Agar aparatur pemerintahan daerah dapat melakukan secara efektif, ekonomis, serta efisien, diperlukan aparatur yang memiliki kualitas. Oleh karena itu, pekerjaan yang diselesaikan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Pekerjaan dapat diselesaikan dan dipresentasikan tepat waktu dengan kualitas pejabat dari Pemerintah Daerah yang paham akan tugas yang diemban (Wibowo dkk., 2020).

Evaluasi akuntabilitas manajer dan organisasi untuk meningkatkan pelayanan publik memerlukan pengukuran kinerja. Selain dapat menggambarkan bagaimana dana pemerintah digunakan, akuntabilitas mencakup pada kemampuan untuk menggambarkan dana pemerintah sudah digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Yanti dkk., 2020). Untuk menentukan kualitas aparatur pemerintah, yaitu aparatur pengawasan intern pemerintah dan yang bertugas langsung melakukan pengawasan intern sebelumnya terhadap organisasi pemerintahan. Semua proses pemeriksaan, pengkajian, penilaian, serta proses memonitoring lainnya pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi disebut sebagai pengawasan intern. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan yang cukup kepada pimpinan terhadap pelaksanaan pendanaan yang dilaksanakan secara efektif serta efisien sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019).

Hasil yang dimiliki oleh laporan keuangan yang berkualitas akan meningkat menjadi semakin baik ketika kompetensi aparatur pemerintahan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan diterapkan (Mardika, 2021). Disisi lain, kompetensi aparatur pemerintahan daerah yang buruk menyebabkan laporan keuangan yang diberikan akan buruk pula terhadap pemerintahan daerah. Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna seperti posisi keuangan entitas pelaporan, realisasi anggaran, saldo anggaran berlebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta alokasi pendanaan yang disediakan oleh laporan keuangan. Khususnya, penyajian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta informasi yang akuntabilitas terhadap entitas pelaporan atas sumber daya yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tujuan pelaporan keuangan pemerintahan (Ode & Kenamon, 2022)

Nilai dari informasi mencakup baik informasi yang diperoleh maupun hasil dari aparatur pemerintah daerah. Informasi dalam laporan keuangan disusun sebaik mungkin sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan berpotensi menyampaikan hasil yang menimbulkan keyakinan akan keakuratannya. Alat pemerintah lingkungan menjalankan kerangka yang menghasilkan data yang diminta oleh penguasaan yang mampu di bidang pembukuan (Hidayat dkk., 2021).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dijelaskan mengenai suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu dalam akuntansi yang menjelaskan hasil dari kinerja operasional dari suatu perusahaan tersebut (Putra & Varina, 2021). Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dari suatu informasi dari kondisi finansial suatu perusahaan. Hasil yang dicapai dari laporan keuangan adalah sebagai data yang dipergunakan membuat keputusan serta digunakan pada entitas yang memperlihatkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang digunakan.

Tujuan dari laporan keuangan adalah digunakan untuk memberikan informasi perihal data finansial, realisasi anggaran, maupun kinerja finansial dari suatu entitas pelaporan yang berguna untuk para kepentingan guna mengambil dan mengevaluasi kebijakan perihal penggunaan sumber daya pada suatu perusahaan. Penyajian laporan keuangan merupakan suatu bukti akhir dari semua bukti transaksi sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi guna tercapainya pemerintahan yang baik. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang, serta sebagai bentuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja yang akan datang (Faturey dkk., 2021).

HIPOTESIS

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

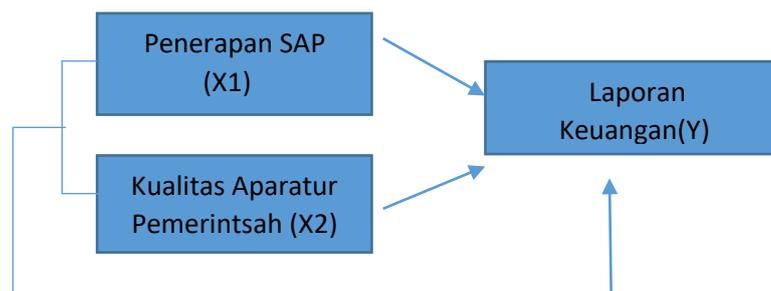
Implementasi dari standar akuntansi pemerintahan yang memberikan jaminan kebenaran dalam laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintah adalah standar yang memberikan jaminan laporan keuangan yang sesuai dengan kualifikasi informasi keuangan yang berguna terhadap penggunanya. Informasi yang berguna merupakan suatu kualifikasi bahwa laporan keuangan tersebut masuk kedalam kriteria (Mahartini dkk., 2021).

H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan laporan keuangan.

Aparatur sipil daerah yang profesional sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Aparatur yang profesional ialah aparatur yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara tuntas. (Intan & Linda, 2020) Aparatur yang profesional akan memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Aparatur yang berkompeten akan mampu menyelesaikan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan yang disusun dengan baik maka akan memenuhi kualifikasi informasi bagi pengguna. (Ramadhan & Alpi, 2019)

H2 : Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan



Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan eksplansi penelitian, penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan jenis penelitian kausalitas, atau penelitian yang mampu menjelaskan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, menjadi fokus penelitian kuantitatif ini, penelitian ini dilakukan untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah terhadap laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dilokasi kantor walikota pemerintahan kota Medan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan. Sumber dari data yang diperoleh melalui sumber primer yaitu data yang diambil melalui informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang mengacu pada individu ataupun SKPD yang dihasilkan dari pengisian kuesioner yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pengaruh penerapan standar akuntansi, aparatur pemerintahan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Metode pengambilan sampel yakni dengan *accidental sampling*. Menurut (Agung & Yuesti, 2019) *accidental sampling*, yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan pengujian yang ternyata kebetulan ditemui dengan jumlah keseluruhan responden yang menyelesaikan kuesioner sebanyak 38 responden, dimana SKPDd yang dimaksud dengan rincian 1 sekretaris bidang anggaran, 1 kepala bidang anggaran, 20 SKPD bidang BAPEDDA, 7 badan inspektorat, 9 badan perbendaharaan. Data penelitian menggunakan data primer yang pengambilan data berasal dari pengisian kuesioner dari SKPD pemerintah kota medan. Program SPSS Versi 25 digunakan untuk analisis data komputerisasi, dan persamaan berikut digunakan untuk regresi linier berganda:

Program SPSS Versi 25 digunakan untuk analisis data komputerisasi, dan persamaan berikut digunakan untuk regresi linier berganda:

$$KLK = \alpha + X_1PSAP + X_2KAPD + e$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)

KAPD : Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah

α : Kostanta

X_1, X_2 : Nilai Koefisien Regresi

e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 50 kuesioner, data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan menyebarkan kuesioner pada satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kota medan. Responden dari penelitian ini adalah sekretaris bidang anggaran, kepala bidang anggaran, SKPD bidang BAPEDDA, badan inspektorat, badan perbendaharaan. Total kuesioner yang dibagikan adalah 50 kuesioner (100%), dimana total kuesioner yang dikembalikan 38 kuesioner (76%), total kuesioner yang tidak dikembalikan 12 kuesioner (24%). Kuesioner yang tidak dikembalikan karena SKPD yang tidak mau ikut serta dalam pengisian kusioner.

Tabel 1. Karakteristik responden pemerintahan kota medan

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase %
1	Jenis kelamin		
	1. Laki-laki	25 orang	65 %

Warliana, Syafina, Hermain
 PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
 MEDAN

2.	Perempuan	13 orang	35%
Total		38 orang	100%
2	Pendidikan terakhir		
1.	SMA	5 orang	13%
2.	D3	10 orang	26%
3.	S1	20 orang	53%
4.	S2	3 orang	8%
Total		38 orang	100%
3	Lama bekerja		
1.	< 1 tahun	0	0%
2.	1-3 tahun	10 orang	26%
3.	4-5 tahun	12 orang	31%
4.	> 5 tahun	16 orang	43%
Total		38 orang	100%

Sumber: Data diolah 2023

Uji Validitas

Program yang digunakan untuk melakukan pengujian instrument pada uji validitas adalah program computer statistic program for social science (SPSS) Versi 25. Penulis menginput bahan pengujian dengan korelasi angket item dengan skor total > r tabel.

Penyebaran kuesioner dalam uji validitas menghasilkan reponden sebesar 38 orang dengan nilai r tabel sengan ketentuan $df = \text{jumlah kasus} = 38$ dan tingkat signifikan sebesar 5% maka angka yang dipeoleh = 0,320 dengan meliputi item penerapan standar akuntansi pemerintah sebanyak 11 item yang valid, kualitas aparatur pemerintahan daerah sebanyak 5 dengan hasil yang valid dan kualitas laporan keuangan sebanyak 8 dengan hasil yang valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Variabel penerapan SAP			
– Item 1	0,629	0,320	VALID
– Item 2	0,756	0,320	VALID
– Item 3	0,793	0,320	VALID
– Item 4	0,695	0,320	VALID
– Item 5	0,474	0,320	VALID
– Item 6	0,558	0,320	VALID
– Item 7	0,610	0,320	VALID
– Item 8	0,543	0,320	VALID
– Item 9	0,567	0,320	VALID
– Item 10	0,622	0,320	VALID

Warliana, Syafina, Hermain
 PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
 MEDAN

– Item 11	0,687	0,320	VALID
Variabel kualitas aparatur			
– Item 1	0,513	0,320	VALID
– Item 2	0,607	0,320	VALID
– Item 3	0,575	0,320	VALID
– Item 4	0,524	0,320	VALID
– Item 5	0,605	0,320	VALID
Variabel kualitas laporan keuangan			
– Item 1	0,744	0,320	VALID
– Item 2	0,588	0,320	VALID
– Item 3	0,734	0,320	VALID1
– Item 4	0,646	0,320	VALID
– Item 5	0,766	0,320	VALID
– Item 6	0,757	0,320	VALID
– Item 7	0,821	0,320	VALID
– Item 8	0,713	0,320	VALID

Sumber : Data diolah 2023

Uji Realibitas

Uji reliabilitas digunakan dalam pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah data dari indikator yang digunakan dapat diukur atau dipercaya. Hasil uji reabilitas dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel lebih besar dari 0,60 . maka dapat disimpulkan bahwa data dsapat dinyatakan realibel atau dipercaya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas cronbach's Alpha	keterangan
Penerapan SAP	0,751	0,60	<i>Reliabel</i>
Kualitas Aparatur	0,878	0,60	<i>Reliabel</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0,659	0,60	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data diolah 2023

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data utuk menganalisi apakah terdistribusi secara normal ataukah tidak. Pengujian ini menggunakan uji *one-sample Kolmogrov Smirnov* yang dapat diketahui bahwa dari nilai taraf signifikasi *unstandardized* residual sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat nilai signifikan. Sehingga data dinyatakan terdistribusi secara normal. Dalam hal ini

menunjukkan data kuesioner telah lulus uji normalitas sehingga data dapat digunakan untuk selanjutnya. Pegujian data tidak menggunakan uji auto kolerasi dikarenakan data tidak menggunakan rentang waktu pada periode tertentu.

Tabel.4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. deviation	1.83095338
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.103
Test Statistic		.112
Astmp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah 2023

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen dengan nilai *Tolerance* >0,10 dan nilai *Variance inflation Factor* (VIF) < 10 maka variabel bebas dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. Dapat diketahui pada tabel nilai *Tolerance* sebesar 0,751 > 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 1,331 < 10. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara variabel independen tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

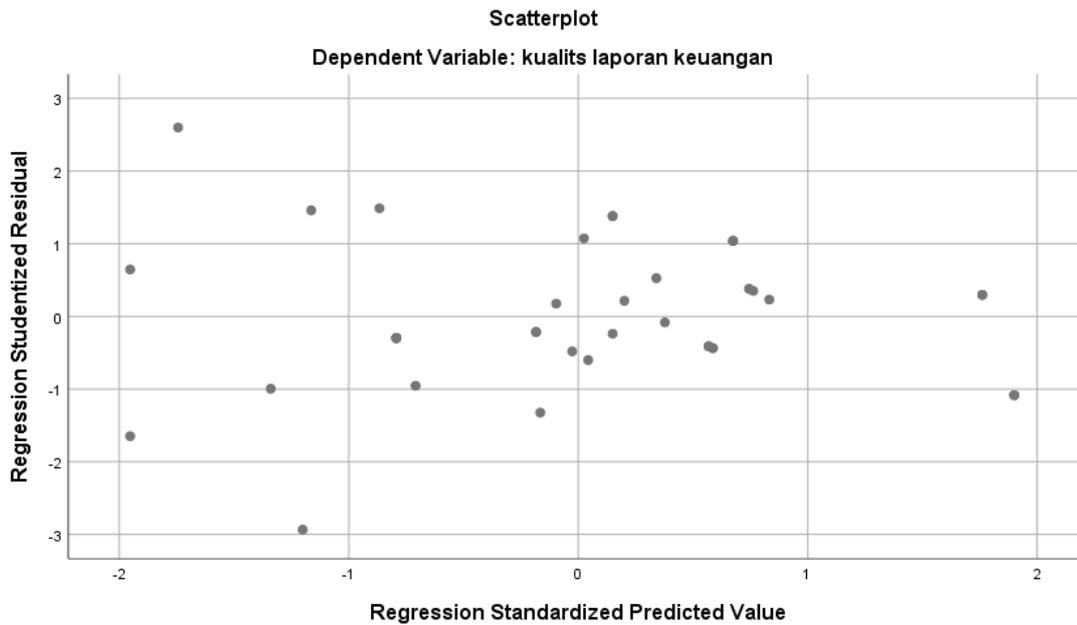
Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Penerapan SAP	0,751	1,331	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Aparatur	0,751	1,331	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data diolah 2023

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas melihat seberapa besar perbedaan varians residual antar pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Dalam grafik scatterplot yang disajikan dapat dilihat terdapat pada titik-titik menunjukkan tersebar secara acak dan tidak membuat pola yang berbeda. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas, sehingga memungkinkan untuk menggunakan model tersebut untuk memprediksi laporan keuangan berbasis variabel independen dari laporan pemerintah daerah.

Grafik. 6 Hasil Uji Heteroksidasitas



Sumber : Data diolah 2023

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y).

Tabel.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients	Coefficients	Beta	t	
		B	Std. Error	Beta	Sig.	
1	(Costant)	6.197	2.710		2.287	0.28
	Penerapan SAP	.493	.069	.702	7.115	.000
	Kualitas Aparatur	.218	.082	.262	2.654	.012

Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah 2023

Hasil uji statistik pada regresi linier berganda, maka dari persamaan regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + X_1 + X_2 + e$$

$$Y = 6,197 + 0,493X_1 + 0,218X_2 + e$$

Persamaan regresi linier tersebut memiliki makna yaitu:

1. Kostanta = 6, 197

Jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan maupun variabel kualitas aparatur pemerintahan daerah dikatakan konstan atau tetap tetap atau konstan, maka variabel kualitas laporan keuangan akan tetap sebesar 6,197

Warliana, Syafina, Hermain
 PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
 MEDAN

2. $X_1 = 0,493$

Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan sebesar 0,493 antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dinaikan 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan bertambah sebesar 0,493.

3. $X_2 = 0,218$

Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan sebesar 0,218 antara peningkatan kualitas laporan keuangan (Y) pada kualitas aparatur pemerintah daerah (X2). Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur Pemerintah daerah dinaikan 1 satuan, maka kualitas Laporan keuangan bertambah sebesar 0,218

Uji Model Parsial

Tujuan pengujian model parsial digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan taraf nilai signifikansi 5% atau 0,05, nilai uji akan dibandingkan dalam pengujian ini. dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 8 Uji Model t

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients ¹		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.197	2.710		2.287	.028
	Penerapan PSAP	.493	.069	.702	7.115	.000
	Kualitas aparatur	.218	.082	.262	2.654	.012

Sumber: data diolah 2023

Nilai t hitung (7,115) lebih besar dari nilai t tabel (2,030) dan taraf nilai signifikansi (0,00) lebih kecil dari (0,05). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Nilai t hitung (2,654) lebih besar dari nilai t tabel (2,030) dan taraf nilai signifikansi (0,012) lebih kecil dari (0,05). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas aparatur pemerintah menunjukkan terdapat hubungan yang berpengaruh signifikan antara kualitas aparatur pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan.

Uji Model Simultan

Nilai F hitung (50,923) dengan nilai F tabel (3,27) dan taraf nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang ditunjukkan dari hasil uji model F. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Model F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	360.935	2	180.468	50.923	.000 ^b
	Residual	124.038	35	3.544		
	Total	484.974	37			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

a. Predictors: (Constant), Kualitas aparatur, Penerapan PSAP

Sumber : Data diolah 2023

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi perhitungan regresi (adjusted R square) adalah 0,730 yang mendekati Sementara itu, secara simultan Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 73% variabilitas pada Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel kualitas aparatur pemerintah menjelaskan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan 27% menunjukkan bahwa variabel lain tidak memiliki model atau persamaan regresi saat ini. Berikut adalah koefisien determinasi pada tabel dibawah ini:

Tabel. 10 Koefisien Determinasi
Model Summary^z

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.7441	.730	1.88254

a. Predictors: (Constant), Kualitas aparatur, Penerapan PSAP

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

sumber : Data diolah 2023

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistic yang telah dilakukan menghasilkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil yang diteliti maka menghasilkan kejelasan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang dipakai memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan di kota medan. penggunaan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdampak besar terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Safitri & Mahsuni, 2020). Dalam hal Ini Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menyampaikan hasil laporan keuangan yang berkualitas, dalam hal penyusunan maupun pemeriksaan laporan keuangan, sehingga keputusan mengenai laporan keuangan di kota Medan menjadi laporan yang dapat digunakan bagi kepentingan pengguna (Pujanira & Taman, 2017). Pemanfaatan tolak ukur yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan informasi terkait dengan keuangan yang bermanfaat serta terdapat keakuratan dan kejelasan, sehingga pemerintahan kota Medan dapat melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan

Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Dalam rangka penyediaan laporan keuangan kota Medan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Suprihatin & Ananthi, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian (Putra & Varina, 2021) ini sejalan yang menyatakan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjadi tolak ukur laporan keuangan disusun sesuai kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna. Peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan suatu kejelasan serta ketegasan pemerintah terhadap suatu keharusan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah guna memberikan laporan keuangan kota Medan yang dibutuhkan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan (Adha & Martiningsih, 2016) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini, pemerintahan daerah dapat membuat keputusan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan laporan keuangan dalam mendukung laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang mampu mewujudkan kualitas laporan keuangan yang relevan, kokoh, dapat menjadi acuan sebagai pembanding, serta dapat dipahami, maka kemampuan sumber daya manusia terkait terhadap penyusunan laporan keuangan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta perilaku kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Fauziyah, 2019) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerapan dan kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan harapan organisasi terhadap aparatur pemerintahan yang tinggi terhadap aparatur pemerintah yang secara aktif berpartisipasi dalam manajemen organisasi dan proses pengambilan keputusan. (Handayani dkk., 2020) Kinerja dan kemampuan seseorang untuk menganalisis suatu masalah pada lingkup pekerjaan dan jabatannya diukur dari pengambilan keputusan terbaik yang diperoleh oleh aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas. Namun, dalam hal ini tidak lepas dari penyeleksian karyawan yang cermat dan tepat untuk suatu posisi dan pekerjaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan apabila sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Berdasarkan penelitian (Siallagan, 2022) yang dilakukan sejalan dengan yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintahan daerah memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun dari penelitian (Sari, 2022) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintahan tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam situasi ini pemerintahan harus menyelesaikan pengawasan terhadap organisasi pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan meliputi seluruh proses pemeriksaan, penelaahan, penilaian, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kebaikan pemerintahan. (Harun, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintahan kota Medan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maka akan baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun pada kualitas aparatur pemerintah daerah menunjukkan semakin berkualitasnya aparatur pemerintah Daerah maka akan berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan. Maknanya penerapan standar akuntansi pemerintah dengan didorongnya kualitas aparatur yang berkompeten memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kota medan.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran praktis
Bagi pemerintahan daerah perlu adanya pelatihan terhadap aparatur pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan demi meningkatkan aspek-aspek penyajian laporan keuangan yang baik.
2. Saran teoritis:
Kepada peneliti dimasa yang akan datang dapat menambahkan variabel yang baru seperti pengendalian internal maupun kompetensi sumber daya.

REFERENCE

- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42.
- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2019). Metode-Penelitian-Bisnis-Kuantitatif-Dan-Kualitatif. In *CV. Noah Aletheia* (Vol. 1, Nomor 1).
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.
- Ayu Kurnia, A., & Jaeni, J. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kinerja keuangan, opini audit, dan pencegahan fraud terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1202–1211.
- Az-Zahra, I. S. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern, Motivasi Kerja, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 32, 65–75.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Dalimunthe, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur terhadap Laporan Keuangan pada kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kab. Simalungun. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 58–66.
- dinas kominfo kota medan. (2021). *Pemko Medan Raih Opini WTP dari BPK*.
- Faturey, S., Ahuluheluw, N., & Basuki, F. H. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1–12.
- Fauziah, E. M. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209.

Warliana, Syafina, Hermain
PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
MEDAN

- Handayani, P. N., Rispanyo, R., & Sunarti, S. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada OPD Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 270–279.
- Hartono, H., & Ramdany, R. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Ternate). *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara*, 1(1), 83–99.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493.
- Hermawan, A. R. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(2), 163–173.
- Hidayat, D., Sari, M., AR, F., & Azizah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Intan DianeBinangkit, Linda Hetri Suryanti, A. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.
- Kbbi.web.id. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.
- Mahmudah Enny W. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara* (Nomor 1).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Mardika, I. H. (2021). *Peranan Aparatur Pemerintah Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan)*. 1(1), 1–13. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/535>
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7.

Warliana, Syafina, Hermain
PENGARUH PSAP DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA
MEDAN

- Ode, D. A., & Kenamon, M. (2022). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus BKAD OKU). *Jurnal ETAP*, 2(2), 106–124.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2).
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98.
- Ramadhan, P. R., & Alpi, M. F. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1), 147–153.
- Rusmana, O., Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Salemba Empat.
- Safitri, N. R., Mahsuni, W. A, J. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB). *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 09(02), 120–131.
- Sari, F. M. (2022). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH, GOOD GOVERNANCE DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 3(1).
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45.
- Siallagan, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Sibolga. *Akuntabilitas*, 16(2), 243–256.
- Suprihatin, N. S., & Ananthy, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242.
- Triwardana, D. (2017). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 4(1), 641–655.
- Umi, K., & Ayu, L. T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Wibowo, W. L., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 52–61.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8.